



Faktor-faktor yang Memengaruhi Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah: Komitmen Organisasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk

Cris Kuntadi¹, Frenadi Irianto², Herty Safitry Yunintasari³

¹ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia, email: cris.kuntadi@dsn.bhayangkarajaya.ac.id

² Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, email: frenadiikd@gmail.com

³ Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia, email: herty.yunintasari@bpk.go.id

Korespondensi Penulis: Frenadi Irianto

Abstract: Previous research or relevant research is very important in a research or scientific article. Previous research or relevant research serves to strengthen the theory and phenomenon of the relationship or influence between variables. This article aims to review the factors that influence regional own-source revenue (PAD) budget planning, namely organizational commitment, gross regional domestic product (GDP) and population, a literature study on State Financial Management. This article is a literature review intended to build hypotheses about the influence of variables for use in further research. The results of this literature review article are organizational commitment, GRDP and population that influence PAD budget planning.

Keywords: Regional Original Income, Organizational Commitment, Regional Gross Domestic Product, Total Population

Abstrak: Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variabel. Artikel ini bertujuan mereview faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan anggaran pendapatan asli daerah (PAD), yaitu komitmen organisasi, produk regional domestik bruto (PDRB) dan jumlah penduduk, suatu studi literatur Manajemen Keuangan Negara. Artikel ini merupakan literature review yang dimaksudkan guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah komitmen organisasi, PDRB dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Komitmen Organisasi, Produk Regional Domestik Bruto, Jumlah Penduduk

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah terakhir diperbaharui dalam (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa dengan adanya hak otonomi daerah setiap pemerintah daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan fenomena banyaknya provinsi dan kabupaten yang mengalami pemekaran di Negara Indonesia sejak adanya UU tersebut, terakhir pada tahun 2022 adalah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Hak otonomi daerah mewajibkan setiap daerah dapat mandiri kedepannya untuk membiayai pemerintahannya dengan memperoleh penerimaan yang berasal dari sumber-sumber potensi pendapatan dari wilayah setempat.

Komponen utama pendapatan suatu daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah. Sementara itu, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kemandirian suatu daerah dalam mengelola potensi sumber pendapatan tercermin pada PAD yang diperoleh, serta ditunjukkan oleh PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007:233).

Ketepatan Perencanaan Anggaran PAD tersebut akan berpengaruh kepada Perencanaan Anggaran belanja suatu daerah khususnya belanja modal pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi infrastruktur dan sarana-prasarana di daerahnya menjadi lebih baik. salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal daerah (C. Kuntadi dkk, 2022). Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan dan penurunan PAD menjadi hal yang utama dalam menentukan besaran anggaran PAD yang disusun. Ketidaktepatan pemerintah daerah dalam menganggarkan PAD tersebut akan berdampak pada kesalahan penilaian kinerja pencapaian PAD suatu daerah serta potensi tidak tercapainya perencanaan kegiatan dan Perencanaan Anggaran belanja daerah khususnya untuk daerah yang baru mengalami pemekaran serta pembentukan provinsi dan kabupaten/kota secara optimal.

Penulis telah melakukan reviu atas laporan keuangan atas pada 10 entitas pemerintah kabupaten yang baru dibentuk kurang lebih sepuluh tahun terakhir di Indonesia, yaitu:

1. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
2. Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung
3. Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat,
4. Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
5. Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah
6. Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara
7. Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara
9. Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat
10. Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat

Perbandingan antara anggaran PAD tahun 2021 dan realisasi PAD tahun 2020 pada kesepuluh kabupaten diatas diketahui bahwa tujuh dari sepuluh kabupaten tersebut tidak menggunakan realisasi PAD tahun sebelumnya sebagai acuan untuk menyusun nilai anggaran PAD tahun berjalan (asumsi deviasi tidak lebih dari 10%). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Realisasi PAD dan Anggaran PAD Sepuluh Kabupaten yang baru dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam Sepuluh tahun terakhir

No	Kabupaten	Realisasi 2020	Anggaran 2021	%
1	Penungkal Abab Lematang	49.466.198.650,00	86.715.582.058,00	75,30%
2	Pesisir Barat	27.813.379.280,00	56.185.682.859,00	102,01%
3	Pangandaran	105.276.341.355,00	150.261.866.550,00	42,73%
4	Mahakam Ulu	20.911.222.943,14	12.455.399.500,00	-40,44%
5	Banggai Laut	26.874.825.275,00	20.543.491.152,00	-23,56%
6	Kolaka Timur	25.298.313.577,00	27.155.017.287,00	7,34%
7	Malaka	54.531.409.057,00	58.937.197.457,00	8,08%
8	Taliabu	24.019.580.875,00	201.323.343.678,00	738,16%
9	Manokwari Selatan	5.964.396.628,00	5.453.964.553,00	-8,56%
10	Pengunungan Arfak	7.989.024.181,00	4.281.206.241,00	-46,41%

Tabel di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Taliabu dan PAD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2021 memiliki deviasi Anggaran paling tinggi yaitu berbeda 738,16% dan 102,01% dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya. Hal tersebut akan menjadi pertanyaan besar seberapa baik Perencanaan Anggaran PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Taliabu dan Pesisir Barat dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi Perencanaan Anggaran PAD, sehingga dapat menjadikan anggaran PAD tersebut sebagai alat ukur pencapaian kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Pasal 38 terkait Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan satuan kerja dikelompokkan ke dalam beberapa kategori dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;
- Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam kategori Sangat Kurang,

Penulis mencoba membandingkan anggaran dan realiasi PAD tahun 2021 kesepuluh kabupaten yang menjadi obyek reuiu, dengan hasil perbandingan sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD Sepuluh Kabupaten yang baru dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam Sepuluh tahun terakhir

No	Kabupaten	Anggaran 2021	Realisasi PAD 2021	%
1	Penungkal Abab Lematang	86.715.582.058	67.909.514.128	78,31%
2	Pesisir Barat	56.185.682.859	28.360.235.945	50,48%

No	Kabupaten	Anggaran 2021	Realisasi PAD 2021	%
3	Pangandaran	150.261.866.550	175.130.968.912	116,55%
4	Mahakam Ulu	12.455.399.500	33.164.866.575	266,27%
5	Banggai Laut	20.543.491.152	22.179.522.152	107,96%
6	Kolaka Timur	27.155.017.287	25.959.468.961	95,60%
7	Malaka	58.937.197.457	55.380.883.238	93,97%
8	Pulau Talibu	201.323.343.678	16.732.231.839	8,31%
9	Manokwari Selatan	5.453.964.553	10.730.292.091	196,74%
10	Penggunungan Arfak	4.281.206.241	4.915.396.388	114,81%

Jika menjadikan PMK 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 diatas sebagai acuan (*benchmark*), untuk mengukur pencapaian realisasi anggaran maka terdapat:

1. **Satu** kabupaten memiliki kinerja pencapaian PAD **sangat kurang** yaitu Pulau Talibu karena memiliki pencapaian kurang dari 50%;
2. **Satu** kabupaten memiliki kinerja **kurang** yaitu Pesisir Barat karena memiliki pencapaian 50% s.d 60%;
3. **Satu** kabupaten memiliki kinerja **cukup** yaitu Penungkal Abab Lematang Iilir karena memiliki pencapaian 60% s.d 80%;
4. Sisanya sebanyak **tujuh** kabupaten memiliki kinerja yang sangat baik karena memiliki pencapaian realisasi anggaran diatas 90% yaitu 93,97% s.d 266,27%.

Selain Realisasi PAD Kabupaten Pesisir Barat dan Pulau Talibu yang tidak mencapai target anggaran, Realisasi Anggaran PAD yang cukup tinggi pada kabupaten Mahakam Ulu dan Manokwari Selatan yang masing-masing mencapai 266,27% dan 196,74% merupakan pertanyaan yang menarik bagi penulis dalam menilai pencapaian tersebut. Apakah kedua pemerintah kabupaten yang berhasil melakukan intensifikasi dan extensifikasi penerimaan PAD atau yang terjadi adalah kegagalan kedua Pemerintah Kabupaten tersebut dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran PAD.

Fenomena kesalahan Perencanaan Anggaran PAD pada Pemerintah Daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota seperti contoh diatas sering terjadi ditemukan khususnya sering terjadi pada Pemerintah Daerah yang baru terbentuk atau mengalami pemekaran. Oleh karena itu, penulis berpendapat ketepatan pemilihan faktor yang memengaruhi Perencanaan Anggaran PAD merupakan hal yang penting bagi Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menganggarkan PAD sebagai sarana tolok ukur kemandirian daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, potensi terhadap penyalahgunaan PAD dapat berasal dari proses perencanaan anggaran, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengecilkan potensi PAD yang dimiliki, agar seolah-olah kinerja pencapaian anggaran PAD dapat terealisasi, sehingga kelebihan atas realisasi PAD dapat digunakan untuk kepentingan golongan/oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD?

METODE

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (**Library Research**). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari *Mendeley*, *Scholar Google* dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Komitmen Organisasi (X1) terhadap Perencanaan Anggaran PAD (Y).

Variabel (X2) komitmen organisasi dalam sebuah instansi pemerintahan perlu diperhatikan dengan melihat Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah berupaya menguraikan tugas pokok dan fungsi instansinya, Satuan kerja perangkat daerah/SKPD telah memiliki dokumen perencanaan strategik (Renstra) instansinya yang lebih operasional, Penyusunan program dan kegiatan selama ini sudah mengakomodir tugas pokok dan fungsi SKPD, Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah melibatkan seluruh bawahannya untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya (C. Kuntadi, 2022). Dengan adanya komitmen organisasi yang dimiliki oleh pimpinan dan seluruh komponen organisasi Perencanaan Anggaran PAD pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat lebih terukur karena telah mempertimbangkan tupoksi setiap SKPD khususnya yang menjadi penghasil pendapatan (*Revenue Center*).

Dalam melaksanakan menatausahakan penerimaan dan pengeluaran, SKPD perlu memperhatikan sejauhmana komitmen organisasi yang ditunjukkan oleh sikap, perilaku, dan persepsi pegawai (Rahmawati Halim, 2016). Hal tersebut akan berdampak pada proses perencanaan anggaran PAD menjadi lebih efektif karena para pihak yang terlibat akan bersungguh-sungguh dalam merencanakan anggaran PAD dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X2) terhadap Perencanaan Anggaran PAD (Y).

Berdasarkan hasil penelitan Pribadi (2019), pengujian terbukti bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini sejalan dengan Maulana Seiyantoro (2019) dan Nuwun Priyono (2016). Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka meningkatkan kemampuan dan mendorong keinginan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dibandingkan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah, sebagai contoh banyak masyarakat yang membeli kendaraan akan meningkatkan penerimaan yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor dan kegiatan konsumsi masyarakat akan tinggi akan berpengaruh pada peningkatan pajak dan retribusi yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi seperti pajak hotel, restoran dan parkir. Sehingga dengan adanya peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat menjadikan PDRB sebagai salah satu variable ukuran yang menentukan besar kecilnya perencanaan anggaran PAD di wilayahnya.

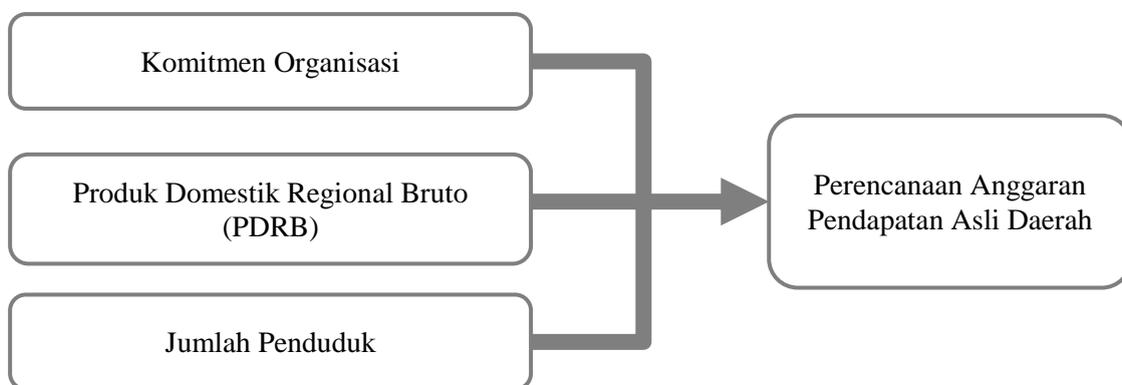
Pengaruh Jumlah Penduduk (X3) terhadap Perencanaan Anggaran PAD (Y).

Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena semakin besar jumlah penduduk maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan juga tingkat produksi yang dihasilkan untuk meningkatkan PAD (Nailia Kamalia dan Rifki Khoirudin, 2019). Hasil penelitian ini di dukung oleh Asmuruf, Rumat, dan Kawung, (2015) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD. Peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan langsung dengan keberadaan masyarakat di wilayahnya antara lain pajak bumi bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penerangan jalan umum, retribusi pelayanan kesehatan, persampahan. Dengan demikian, Pemerintah daerah dapat menjadikan jumlah penduduk sebagai salah satu variabel ukuran yang menentukan besar kecilnya Perencanaan Anggaran PAD di wilayahnya.

Hasil penelitian tersebut yang dilakukan oleh Prasetyo, dkk (2022) menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang lain. Diketahui bahwa jumlah penduduk tidak signifikan memengaruhi PAD. Namun demikian dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tidak berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap PAD diduga karena salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan jumlah penduduk tetap memengaruhi kegiatan perencanaan anggaran PAD tetapi harus komitmen pemerintah dalam merealisasikan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD di daerahnya.

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di peroleh rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, komitmen organisasi, PDRB, dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap perencanaan anggaran PAD. Selain dari tiga variabel exogen ini yang memengaruhi perencanaan anggaran PAD, masih banyak variabel lain yang memengaruhinya diantaranya adalah Pengeluaran pemerintah, Jumlah wisatawan, Jumlah hotel, Pendapatan per kapita, Investasi, Gaya kepemimpinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD.
2. PDRB berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD.

3. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran PAD.

REFERENSI

- Cris, Kuntadi., Kalis, Endah Wahyuni., Christine, Maisye Mansawan. 2022. *Literatur Review: Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja Penganggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Dinasti Review.
- Rahmawati, Halim. 2016. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan. Jakarta.
- M, Rasuli. 2016. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Penyempurnaan Sistem Administrasi, Komitmen Dari Seluruh Komponen Organisasi, Kecukupan Sumber Daya, Dan Sistem Reward Punishment Terhadap Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Di SKPD Provinsi Riau.
- Nailia, Kamalia., dan Rifki Khoirudin. 2019. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Maulana, Seinyantoro Pribadi. 2019. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Nuwun, Priyono. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Magelang Periode Tahun 2001-2010).
- Sane, Bembok., Een, N Walewangko., dan Hanly, Siwu. 2020. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tolikara.
- Aris, Adi Prasetyo., Virgiana, Nugransih Siwi., dan Eranus, Yoga Kudhani. 2022. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*.
- Pajak Asli Daerah., <https://www.online-pajak.com/>
- Jumlah Penduduk., <https://www.bps.go.id>